



Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO
BUPATI SLEMAN



DANANG MAHARSA, SE
WAKIL BUPATI SLEMAN

108 Tahun Sleman



KENDALIKAN INFLASI: Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo (tengah) ketika menerima intensif fiskal kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah. Penghargaan diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Greget Nyawiji lan Hangayomi

Pelayanan Prima, Masyarakat Sejahtera

Bupati Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Danang Maharsa, SE terus berkomitmen mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong. Komitmen itu tecermin sejak keduanya dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Sleman pada 2021 hingga sekarang. Semua itu bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Sleman.



CEGAK STUNTING: Wakil Bupati Danang Maharsa, SE (kiri) saat peluncuran beras fortifikasi bagi Ibu hamil.

D.I. Yogyakarta menyerahkan Piagam Penilaian Kepatuhan untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD) dan dua unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP); Puskesmas Kalasan, serta Puskesmas Moyudan.

Hasil atas meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman juga tampak pada capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM), yang pada 2023 mencapai 84,68. Secara fisik juga dapat dilihat dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pelayanan publik. Indikatornya adalah kinerja persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian Indeks SPBE Kabupaten Sleman pada 2023 sebesar 3,19. Meningkatkan dibanding 2022 sebesar 3,19.

Tata kelola pemerintahan yang baik berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang makin akuntabel. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Sleman kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu berarti Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mempertahankan predikat WTP atas kinerja keuangan daerah selama 13 kali berturut-turut sejak 2012.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh. Baik dari segi

pendidikan, kesehatan, hingga kualitas hidup. Satu di antaranya dengan program wifi gratis di seluruh padukuhan sejumlah 1.212 lokasi. Ditambah fasilitas internet gratis di tempat-tempat umum. Program tersebut bertujuan menunjang sarana belajar siswa sekolah sekaligus mendukung geliat ekonomi mikro. Juga sebagai sarana masyarakat menambuh wawasan dan memudahkan komunikasi melalui teknologi informasi. Kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman pun terus meningkat. Dengan angka harapan lama sekolah (HLS) mencapai 16,77 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 11,01 tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga membangun sport center di tiap kalurahan. Ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berbanding lurus dengan umur harapan hidup (UHH) warga Sleman yang juga terus meningkat. Yakni 75,26 tahun pada 2023. Sedangkan UHH 2022 adalah 75,00 tahun.

Dengan demikian, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sleman terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Kabupaten Sleman 2023 sebesar 84,86. Pemerintah Kabupaten Sleman juga berhasil menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Susenas Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 97,50 ribu orang (7,52 persen). Angka tersebut turun 0,22 persen atau 1,42 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 98,92 ribu orang (7,74 persen). (*)



SAYANG ANAK: Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyapa anak-anak di sebuah acara di Taman Anak Deggung, Sleman.

Kokohkan Predikat Kabupaten Layak Anak

PENGHARGAAN prestisius telah diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan derajat hidup, hak, dan kesehatan anak-anak. Hal itu pula yang membuat Sleman kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2023. Sebagaimana penghargaan serupa yang juga telah diterima setahun sebelumnya. Penghargaan itu menjadi bukti bahwa Kabupaten Sleman telah menjalankan sistem pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan guna menjamin pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Termasuk di dalamnya adalah upaya pencegahan dan penurunan stunting.

Bahkan, terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman berhak atas penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa insentif fiskal sebesar Rp 6 miliar untuk penurunan stunting. Ditambah lagi Rp 6,8 miliar atas kinerja dalam penghapusan kemiskinan secara ekstrem dan Rp 6,1 miliar berkat keberhasilan percepatan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai berkontribusi dalam pening-

katan kesejahteraan masyarakat. Angka stunting di wilayah Kabupaten Sleman terus menurun. Pada 2023 mencapai 4,51 persen. Turun 2,37 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,88 persen. Hasil positif itu tak lepas dari beragam program penurunan stunting yang telah dilakukan. Misalnya, pemberian beras fortifikasi untuk pemenuhan gizi ibu hamil.

Berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Sleman juga terus meningkatkan infrastruktur pendukungnya. Misalnya melalui revitalisasi kawasan Deggung sebagai taman layak anak. Deggung sebagai ikon Kabupaten Sleman telah dipercantik. Keberadaan taman anak menjadi bagian tak terlupakan.

Revitalisasi taman anak di Deggung merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi anak dan orang tua. Untuk berkumpul, berinteraksi, dan beraktivitas sesuai kebutuhan usia anak.

Revitalisasi Taman Deggung juga bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup dan mendukung pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 persen. (*)



MANDIRI: Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo (tengah) meresmikan TPST Tamanmartani beberapa waktu lalu.

Kelola Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

SAMPAH sempat menjadi masalah yang meresahkan masyarakat. Terlebih pasca penutupan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan belum lama ini. Nah, demi mencegah konflik horizontal di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman segera tancap gas. Berbagai upaya penanganan sampah dilakukan dari hulu ke hilir.

Pertama, membangun TPST Tamanmartani di Kapanewon Kalasan berkapasitas 80 ton per hari. TPST Tamanmartani telah diresmikan oleh Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo pada 21 Desember 2023. Berikutnya TPST di Kapanewon Minggir dan Turi sedang dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga Sleman dalam upaya mengurangi volume sampah rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah. Adapun tugasnya adalah melaksanakan kebijakan strategis dan pengawasan pengelolaan sampah.

Penanganan sampah dari hulu ke hilir dilakukan dengan menggugah kesadaran masyarakat. Agar lebih peduli sampah. Masyarakat diimbau mengolah sampah organik secara mandiri. Selain itu, tiap rumah tangga diarahkan mengelola sampah berbasis 3R (reduce, reuse, dan recycle). Masyarakat diajak mengolah sampah layak jual dan layak daur ulang melalui kegiatan bank sampah dan sedekah sampah. Tiap warga diimbau berkreasi serta memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat, berdaya guna, dan bernilai ekonomi.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga akan membangun beberapa unit sarana pengelolaan sampah dan secara kontinyu mengedukasi masyarakat akan arti penting kesadaran mengelola sampah secara mandiri.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil mengatasi masalah kekeringan di wilayah Prambanan. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih telah tersalur melalui pipa jaringan PDAM Tirta Sembada. (*)



PERAYAAN HUT ke-108 Kabupaten Sleman tahun ini diiringi dengan beragam program, kegiatan, dan kebijakan yang berbuah prestasi dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Selama satu tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi. Semua itu demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ihwal tata kelola pemerintahan yang baik terbukti dengan capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sleman pada 2023 sebesar 80,82 dengan predikat A berdasarkan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan predikat A dengan nilai 82,75 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Lebih dari itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Pemerintah Kabupaten Sleman meraih poin 93,54 pada penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023. Nilai ini meningkat 1,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kesempatan itu, ORI Perwakilan



kabarsleman



Pemkab Sleman



slemankab.go.id



SlemanTV